



ASEAN PARLIAMENTARIANS FOR HUMAN RIGHTS

Anggota Parlemen Mendesak Pemerintah Myanmar dan ASEAN untuk Melindungi Rakyat Sipil di Wilayah Rakhine

JAKARTA, 30 Agustus 2017—Anggota Parlemen dari seluruh kawasan Asia Tenggara menyerukan kepada ASEAN dan para pemerintah regional untuk mengambil langkah segera untuk melindungi rakyat sipil Myanmar di wilayah Rakhine State dan mencegah bencana kemanusiaan di sana.

“Saat ini adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan aksi, atau kita akan mengulang lagi tragedi Kamboja terjadi di halaman belakang kita” kata Anggota Parlemen Malaysia, Charles Santiago, Ketua ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR), mengacu pada tragedi yang disebabkan oleh Khmer Rouge di Kamboja pada tahun 1970an. “Ini waktunya negara-negara anggota ASEAN mengesampingkan kebijakan tidak ikut campur dan memperingatkan Myanmar untuk menghentikan pembunuhan”.

Beberapa hari setelah konflik antara tentara Myanmar dan pemberontak Rohingnya memuncak, para anggota parlemen menyerukan kepada pemimpin tentara Myanmar, Min Aung Hlaing, untuk memastikan bahwa tentara di bawah perintahnya menahan diri dan menghindari korban sipil, serta mendesak pemerintah Myanmar di bawah kepemimpinan State Counsellor (Kanselir Negara), Aung San Suu Kyi, untuk menghindari retorika yang membuat panas, serta mengambil kebijakan untuk menurunkan tensi dan segera mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan perdamaian jangka panjang dan kemakmuran di area tersebut.

“Prioritas utamanya haruslah melindungi rakyat sipil. Tindakan darurat harus diambil oleh seluruh pihak untuk melindungi semua individu yang terjebak dalam kekerasan ini, mengesampingkan masalah etnisitas atau status kewarganegaraan” kata anggota Dewan APHR, Eva Kusuma Sundari, yang juga merupakan anggota DPR-RI. “Ini bukan hanya masalah politik, tapi juga masalah kewajiban dasar untuk melindungi umat manusia—sebuah kewajiban di bawah undang-undang kemanusiaan internasional”.

Krisis terbaru terjadi setelah sebuah serangan dilancarkan oleh militan Rohingnya pada sebuah pos polisi di bagian utara wilayah Rakhine pada tanggal 25 Agustus yang mengakibatkan puluhan orang meninggal, termasuk 12 orang tentara Myanmar. Militer Myanmar kemudian meluncurkan “operasi pembersihan” sebagai respon, yang mengakibatkan pengusiran terhadap ribuan penduduk dan juga dilaporkan adanya pembakaran masal terhadap rumah-rumah dan bangunan”.

Para anggota parlemen mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap para rakyat sipil yang lemah yang terjebak dalam tindak kekerasan dan memperingatkan pemerintah Myanmar dan pemerintah negara tetangga untuk bersama-sama menunjukkan tanggung jawab untuk melindungi semua penduduk, mengungkapkan kekhawatiran bersama atas penolakan pemerintah Bangladesh pada para pengungsi Rohingnya yang berusaha kabur dari tindak kekerasan dengan menyebrangi batas negara.

“Pemerintah Bangladesh harus mengizinkan para pengungsi Rohingnya untuk mengungsi, dan menghentikan penolakan, yang membuat rakyat yang lemah menghadapi bahaya langsung. Negara-negara anggota ASEAN harus meningkatkan perhatian terkait dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk para pengungsi, yang dijadikan alasan utama pemerintah Bangladesh untuk menolak pengungsi” jelas anggota parlemen Filipina, Teddy Baguilat, yang juga anggota Dewan APhR.

“Para pemerintah di negara-negara ASEAN harus menerima lebih banyak pengungsi ke negara mereka dan menyediakan perlindungan yang cukup dan kesempatan kependudukan. Ini adalah masalah regional dan jika para pemimpin negara ASEAN tidak mengambil langkah, maka ini akan berakibat pada ketidakstabilan yang bisa berpengaruh ke seluruh wilayah regional Asia Tenggara”.

Meskipun menyadari keterbatasan konstitusional yang dihadapinya, para anggota parlemen juga menyerukan pada pemerintah sipil untuk menurunkan retorikanya demi mendukung deeskalasi konflik dan mengurangi tensi.

“Kantor Kanselir Negara Aung San Suu Kyi mungkin tidak memiliki kontrol atas militer, namun memiliki kontrol atas informasi dan pesan yang disampaikan kepada publik. Para pejabat seharusnya menahan diri dari membagikan informasi yang bisa menaikkan tensi. Menggunakan istilah yang emosional dan menyerang terhadap para pekerja bantuan kemanusiaan adalah sebuah permainan yang berbahaya dan harus dihentikan. Tidak hanya berisiko menghalangi bantuan yang sangat dibutuhkan dan bantuan yang bisa menyelamatkan nyawa rakyat sipil, hal tersebut juga akan memperburuk konsekuensi dari konflik ini” jelas Baguilat.

Pada tanggal 27 Agustus, Kantor Kanselir Negara Myanmar membagikan foto-foto dan informasi melalui Facebook yang mengisyaratkan adanya hubungan antara organisasi-organisasi kemanusiaan internasional dengan para “teroris ekstrimis” di bagian utara wilayah Rakhine. PBB kemudian mengumumkan relokasi untuk semua “staff yang tidak kritis” keluar dari area tersebut dan meninggalkan puluhan ribu orang tanpa akses bantuan.

APHR kembali menyerukan panggilannya kepada pemerintah Myanmar untuk segera mengambil langkah implementasi atas rekomendasi dari Komisi Pendampingan Wilayah Rakhine yang dipimpin oleh mantan Sekertaris Jenderal PBB, Kofi Annan, yang telah disampaikan kepada pemerintah pada tanggal 24 Agustus.

“Pemerintah Myanmar harus menyadari bahwa kekerasan bukanlah solusi jangka panjang untuk para penduduk wilayah Rakhine. Rekomendasi dari Komisi Rakhine harus segera diimplementasikan, terutama pada poin-poin yang bertujuan mengurangi tensi, memfasilitasi dialog inter-komunal, dan mendukung hak-hak serta akuntabilitas” kata anggota dewan APhR, Mu Sochua, anggota parlemen nasional Kamboja.

“Laporan ini juga menunjukkan adanya kebutuhan atas solusi-solusi regional untuk menghadapi tantangan-tantangan jangka panjang di Rakhine State. ASEAN harus menyuarakan pendapat dan mendorong solusi untuk mengatasi krisis yang memanas ini. Ini harus segera terjadi segera atau korban kemanusiaan akan terus berjatuhan”.